

## **BAB III**

### **KONDISI UMUM INDUSTRI KAYU LAPIS DI INDONESIA**

#### **III.1 Perkembangan Industri Kayu Lapis Nasional**

##### **III.1.2 Kontribusi Industri Kayu Lapis terhadap Perekonomian**

Pada masa awal pemerintahan orde baru, pembangunan ekonomi nasional sangat gencar dilaksanakan untuk mendukung program stabilisasi dan rehabilitasi kondisi ekonomi yang keadaannya tidak baik saat itu. Pada saat itu, pemerintah berusaha menggali setiap potensi ekonomi yang mungkin dimiliki untuk menghasilkan pendapatan bagi negara. Selain minyak dan gas bumi, pemerintah juga mengandalkan sektor kehutanan sebagai sumber penghasil devisa. Produk hasil hutan yang semula diekspor hanya berupa kayu gelondongan kemudian seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi yang terjadi serta berbagai kebijakan yang diterapkan, mengalami perkembangan produk untuk diekspor diantaranya yang paling berkembang pesat adalah kayu lapis.

Industri kayu lapis mengalami pertumbuhan yang pesat selama periode 1980-1997. Hal ini berhubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Pertanian, Perindustrian, dan Perdagangan/Koperasi) pada bulan Mei 1980 mengenai penyediaan kayu dalam negeri yang terkait dengan larangan untuk mengekspor kayu gelondongan (bulat) yang dilakukan secara bertahap. Sebagai tindak lanjutnya, pada bulan April 1981 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri (Kehutanan, Aneka Industri, Perdagangan Dalam Negeri, dan Perdagangan Luar Negeri) mengenai peningkatan industri pengolahan kayu terpadu yang berintikan kayu lapis. Upaya pemerintah untuk menciptakan nilai tambah pada produk kayu yang diekspor melalui larangan ekspor kayu bulat merupakan langkah antisipatif pemerintah dalam mencegah

adanya penurunan devisa negara akibat mulai menurunnya harga minyak dunia pada saat itu. Hal tersebut telah menyebabkan industri kayu lapis berkembang sangat pesat. Berdasarkan tabel III-1 dibawah ini, pada tahun 1973 Indonesia baru mempunyai dua pabrik kayu lapis dengan kapasitas terpasang sebesar 28.000 m<sup>3</sup> dan produksi 19.000 m<sup>3</sup>.

**Tabel III-1**  
**Perkembangan Pabrik dan Kapasitas Terpasang Industri Kayu Lapis**  
**1973-1997**

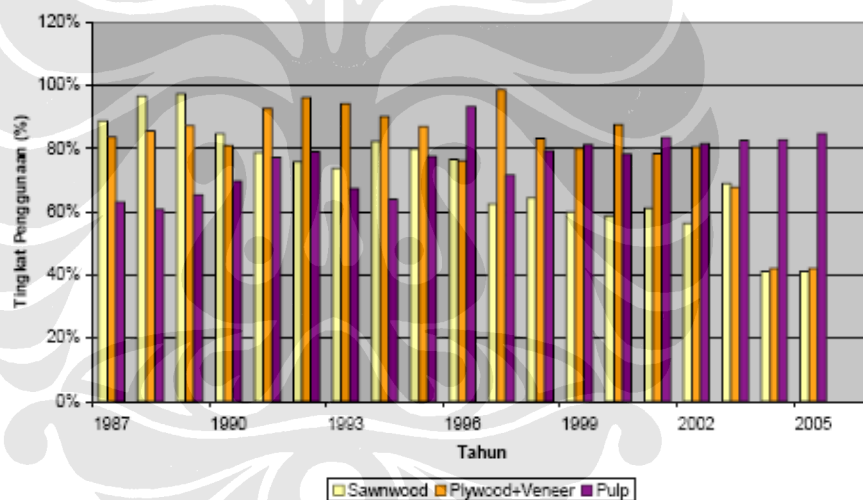
<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pabrik</b>	<b>Kapasitas Terpasang (000 m<sup>3</sup>)</b>	<b>Produksi (000 m<sup>3</sup>)</b>
1973	2	28	19
1980	29	1949	1011
1985	101	6228.1	4983
1988	113	7271	7700
1989	114	8990	8900
1990	116	10180	9400
1991	118	-	10000
1992	118	9459	10700
1993	121	10038	10600
1994	120	11113	9800
1997	122	-	9600
2000	-	-	8200

Sumber: diolah dari berbagai sumber  
(-) menunjukkan data tidak tersedia

Setelah dikeluarkannya larangan ekspor kayu bulat tersebut, jumlah pabrik kayu lapis meningkat dengan sangat pesat menjadi 29 pabrik kayu lapis dengan kapasitas terpasang mencapai 1.949.000 m<sup>3</sup> pada tahun 1980. Pada tahun 1985 ketika larangan ekspor kayu bulat sudah berlaku penuh (tidak diperkenankan lagi), jumlah pabrik kayu lapis kembali meningkat pesat menjadi 101 pabrik. Seiring dengan penambahan jumlah pabrik kayu lapis di tanah air, kapasitas terpasang industri ini pun terus meningkat hingga

pada tahun 1985, kapasitas terpasang mencapai 6.228.100 m<sup>3</sup> dengan produksi kayu lapis mencapai 4.983.000 m<sup>3</sup>. Dalam perkembangannya, penggunaan kapasitas terpasang industri kayu lapis mengalami fluktuasi yang cenderung bergerak ke arah yang menurun. Menurut Data Biz (2005), beberapa perusahaan yang cukup besar dan terintegrasi dengan sumber bahan baku diperkirakan pada tahun 2004 masih dapat memanfaatkan kapasitas produksinya antara 50% hingga 60% sedangkan perusahaan-perusahaan kayu lapis yang berskala kecil pemanfaatannya hanya sekitar 40% (grafik III-1).

**Grafik III-1**  
**Tingkat Penggunaan Kapasitas Terpasang Industri Pengolahan Kayu**  
**1987-2006**



Sumber: Road Map Revitalisasi Industri Kehutanan, Departemen Kehutanan 15 Juni 2007

Salah satu penyebab terjadinya kondisi tersebut adalah adanya kendala finansial yang harus dihadapi oleh produsen kayu lapis akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika telah menyebabkan peningkatan jumlah utang yang harus dibayarkan kepada kreditur yang sebagian besar merupakan pinjaman investasi yang berasal dari luar negeri. Selain itu, masih adanya ketergantungan bahan penolong yang harus di import menyebabkan beban

produksi industri kayu lapis menjadi semakin berat. Sebagian komponen biaya produksi dihitung dalam mata uang dollar AS dimana komposisinya mencapai 60-70 persen (CIC, 1998). Tabel III-2 memperlihatkan perbandingan antara biaya bahan baku dan bahan penolong yang bisa diproduksi sendiri, dibeli dari dalam negeri serta yang harus di import.

**Tabel III-2**  
**Perbandingan Nilai Penggunaan Bahan Baku dan**  
**Bahan Penolong Industri Kayu Lapis (Rp.000)**

Tahun	Jenis Bahan Baku	Produksi Sendiri	Pembelian Domestik	Pembelian Import
1994	Bahan Baku	309518085	540436065	-
	Bahan Penolong	-	824163091	1308320
1995	Bahan Baku	191208189	255513544	-
	Bahan Penolong	4519071	72862130	231099
1997	Bahan Baku	498388957	166734976	-
	Bahan Penolong	39828080	136825866	328575
1999	Bahan Baku	636834221	873000351	-
	Bahan Penolong	-	285215389	238979
Total		1680296603	3.155E+09	2106973

Sumber: Statistik Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan BPS 1994, 1995, 1997, 1999

Perusahaan-perusahaan kayu lapis dalam industri kayu lapis di Indonesia sebagian besar merupakan perusahaan yang terintegrasi dengan perusahaan pemegang lisensi HPH. Produsen kayu lapis terpadu tersebut biasanya merupakan milik grup perusahaan besar atau setidaknya memiliki kaitan bisnis erat dengan grup perusahaan besar karena tergolong memiliki investasi yang besar dengan tingkat pengembalian modal yang cukup lama (Visidata Riset Indonesia, 2002). Sebagian besar produsen kayu lapis di Indonesia didominasi oleh kelompok bisnis tertentu seperti Barito Pacific Group, Djajanti

Group serta Kalimanis Group yang pada umumnya mempunyai kapasitas produksi mencapai lebih dari 500.000 m<sup>3</sup> per tahun. Berdasarkan data yang terdapat dalam lampiran 1, sampai tahun 2004 grup perusahaan yang menjadi *leader* dalam industri kayu lapis di dalam negeri adalah Barito Pacific Group dengan kapasitas produksi yaitu sebesar 1.590.300 m<sup>3</sup> per tahun. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan data per perusahaan maka kapasitas produksi terbesar diperoleh oleh PT Kayu Lapis Indonesia yang dimiliki oleh Kayu Lapis Indonesia Group, dengan kapasitas produksi sebesar 480.000 m<sup>3</sup>. Sebagian besar lokasi pabrik kayu lapis tersebut berada di dekat wilayah yang memiliki areal hutan yang luas seperti di Sumatera dan Kalimantan dengan maksud untuk mendekatkan lokasi pabrik dengan sumber bahan baku.<sup>5</sup> Adapun untuk Irian Jaya, walaupun memiliki wilayah hutan yang cukup luas namun keberadaan produsen kayu lapis di propinsi tersebut belum banyak dikarenakan keberadaan infrastruktur yang masih sangat minim. Oleh karena itu, berdasarkan tabel produksi kayu lapis per propinsi (lampiran 2) dapat diketahui bahwa sentra produksi kayu lapis umumnya berada di Sumatera khususnya di Riau dan Jambi serta untuk propinsi Kalimantan umumnya di Kalimantan Timur. Akan tetapi sejalan dengan perkembangan kemampuan teknologi yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pabrik kayu lapis dibangun di wilayah yang tidak dekat dengan wilayah hutan seperti contohnya PT Kayu Lapis Indonesia yang meskipun berlokasi di Jawa Tengah namun mampu memiliki kapasitas produksi yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kayu lapis yang berada di wilayah yang mempunyai hutan luas.

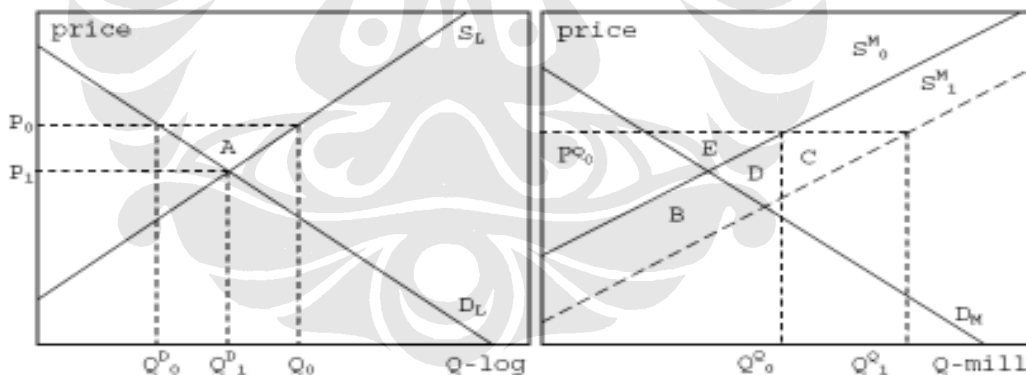
Perkembangan industri kayu lapis di Indonesia terkait erat dengan prioritas yang diberikan terhadap sektor usaha ini dalam pembangunan nasional dengan ditunjang berbagai kebijakan pemerintah. Pertumbuhan industri kayu lapis yang secara relatif memperlihatkan tren positif terutama selama periode 1980-1997 disebabkan beberapa

---

<sup>5</sup> Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki luas hutan hingga mencapai 69,29 persen dari luas wilayahnya yaitu 14,65 juta hektar dari 21,14 juta hektar. Hutan di Kaltim merupakan hutan terluas di Pulau Kalimantan yang mencapai 40,78 persen dari total luas hutan di Kalimantan. ([http://www.eu-flegt.org/newsroom\\_detail.php?pkid=303&lang=in](http://www.eu-flegt.org/newsroom_detail.php?pkid=303&lang=in)).

faktor, diantaranya karena adanya larangan ekspor kayu bulat serta beberapa kebijakan lain yang mendukung diterapkannya aturan ini. Kebijakan larangan ekspor kayu log sebagai upaya menciptakan nilai tambah kayu-kayu sebelum diekspor telah berhasil mengembangkan industri pemrosesan kayu terutama industri kayu lapis. Ekspor kayu olahan dianggap lebih menguntungkan dibandingkan ekspor kayu log karena harga jual yang didapatkan lebih tinggi. Hal senada dijelaskan oleh Resosudarmo & Yusuf (2006) yang mengatakan bahwa bagi yang pro dengan kebijakan larangan ekspor kayu ini, *welfare gain* yang didapatkan dari industri pemrosesan kayu akan lebih besar dari *welfare loss* yang terjadi pada *logging industry*. Secara grafis mereka menjelaskan hal tersebut melalui gambar III-1 sebagai berikut.

**Gambar III-1**  
**Permintaan & Penawaran dalam**  
**Industri Penebangan dan Pengolahan Kayu**



Sumber: Budy P. Resosudarmo dan Arief Anshory Yusuf, *Is the Log Export Ban Effective? Revisiting the Issue through the Case of Indonesia*, Economics and Environment Network Working Paper, 13 Juni 2006, Australian National University.

Berdasarkan grafik tersebut, pada awalnya dikondisikan bahwa jumlah kayu log ( $Q$ -log) yang diproduksi di suatu negara sebesar  $Q_0$ . Dengan harga internasional (*price*) kayu log di pasar internasional sebesar  $P_0$ ,  $Q^D_0$  merupakan bagian yang dijual untuk industri pengolahan kayu domestik. Ketika kebijakan larangan ekspor kayu diterapkan

maka yang sebenarnya akan terjadi adalah pasokan kayu untuk pasar domestik lebih besar jumlahnya sehingga mendorong terjadinya penurunan harga kayu log menjadi  $P_1$ . Dengan harga kayu log yang lebih murah ini, maka permintaan industri pengolahan kayu terhadap kayu log ( $D_M$ ) meningkat menjadi  $Q^D_1$ . Penurunan harga kayu ini menyebabkan terciptanya *welfare loss* sebesar segitiga A. Akan tetapi di sisi lain, penurunan harga kayu log ini justru memperbesar kemampuan industri kayu olahan untuk memproduksi lebih banyak lagi akibat adanya penambahan pasokan kayu tersebut. Hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran kurva penawaran dalam industri pengolahan kayu dari  $S^M_0$  ke  $S^M_1$ . Dengan asumsi bahwa awalnya keseimbangan dalam industri pengolahan kayu ini adalah saat  $P^Q_0$  dan  $Q^Q_0$  maka *welfare gain* yang akan tercipta adalah sebesar luas area BDC.

Setelah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan ekspor kayu bulat, pemerintah kemudian mengenakan kebijakan pengenaan pajak ekspor yang tinggi terhadap kayu gergajian yaitu sebesar USD 250 – 1000 per  $m^3$  dan berlaku mulai November 1989. Pengenaan pajak ekspor yang tinggi terhadap kayu bulat yaitu sebesar USD 500 – 4800 per  $m^3$  menyusul dikenakan pada Juni 1992 sebagai ganti dari pencabutan kebijakan larangan ekspor kayu bulat (Simangunsong, 2004).<sup>6</sup>

Penerapan kebijakan-kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari rencana kebijakan pengembangan industri kayu lapis yang telah dilakukan sebelumnya. Sejak sistem konsesi HPH mulai diberikan pada tahun 1967, pada saat itulah pemerintah mengharuskan pemegang HPH untuk melakukan investasi lanjutan ke hilir dengan membangun pabrik kayu lapis. Terkait dengan hal ini, pemerintah tidak hanya memberikan prioritas dalam program alokasi kredit kepada sektor industri kayu lapis (Roesad, 1996) tetapi juga subsidi awal pendirian pabrik kayu (Hernawan, 2002). Kondisi

---

<sup>6</sup> Kebijakan larangan ekspor kayu bulat berhasil mengembangkan industri kayu lapis dan kayu gergajian namun karena fokus pengembangan industri berbasis kehutanan pada periode 1980-1990 adalah industri kayu lapis maka segala upaya pemerintah ditujukan untuk pengembangan industri kayu lapis nasional. Kebijakan larangan ekspor kayu bulat dihentikan dengan alasan untuk menghindari klaim internasional yang menganggap kebijakan larangan ekspor kayu bulat sebagai *non-tariff barrier* (Simangunsong, 2004).

ini menyebabkan pertumbuhan industri kayu lapis terus berlanjut hingga mencapai puncaknya pada tahun 1997 dimana pada saat itu jumlah pabrik kayu lapis mencapai 122 unit dengan total produksi kayu lapis meningkat menjadi 10.947.633 m<sup>3</sup>. Akan tetapi setelah periode tersebut, jumlah produsen kayu lapis di Indonesia mulai berkurang (tabel III-1).

Perkembangan jumlah produsen kayu lapis diimbangi dengan peningkatan dalam produksinya. Produksi kayu lapis nasional tergolong sangat mengagumkan karena jika dilihat pada tabel III-1, pada tahun 1988 jumlah produksi kayu lapis sudah melebihi kapasitas terpasang industri ini. Pada periode selanjutnya, kondisi ini terus terjadi berulang. Kemungkinan yang terjadi adalah jumlah pabrik kayu lapis lebih besar daripada yang dilaporkan secara resmi (Roesad, 1996) atau dengan kata lain adanya perusahaan-perusahaan ilegal yang memproduksi kayu lapis. Hal ini dapat terjadi mengingat ketersediaan kayu hutan sebagai bahan baku utama industri ini sangat mudah didapatkan saat itu. Akan tetapi semenjak tahun 1998, produksi kayu lapis dalam negeri mulai menurun akibat masalah kelangkaan bahan baku yang juga membuat harga kayu menjadi sangat mahal karena potensi hutan Indonesia yang semakin menurun dan penyelundupan kayu gelondongan ke luar negeri (Ogawa et al, 2006).

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri kayu lapis nasional yaitu nilai dan volume ekspor yang bisa disumbangkan sektor ini terhadap perekonomian. Industri kayu lapis merupakan industri yang memberikan kontribusi terbesar sebagai penyumbang devisa negara dibandingkan industri produk kehutanan lainnya (lihat tabel III-5). Dengan total ekspor produk kehutanan sebesar 1.708 juta US\$ pada periode 1987, sebesar 1.156 juta US\$ berasal dari ekspor kayu lapis. Kontribusi industri kayu lapis terhadap pemasukan devisa terus meningkat hingga pada tahun 1997,



nilai ekspor kayu lapis mencapai 3.410.575.700 US\$ namun setelah itu terus mengalami penurunan yang sangat tajam hingga pada tahun 2006 menjadi 1.506.700.000 US\$.

**Tabel III-5**  
**Kontribusi Produk Kehutanan Terhadap Pemasukan Devisa (US\$ Juta)**

<b>Ekspor</b>	<b>1987</b>	<b>1988</b>	<b>1989</b>	<b>1991</b>	<b>1992</b>	<b>1993</b>	<b>1994</b>
Kayu gelondongan, gergajian, balok	436	629	807	65	831	1073	1629
Kayu lapis	1156	1839	2069	2764	2868	3270	4746
Rotan	116	162	367	232	291.3	298.6	325.6
Total ekspor produk kehutanan	1708	2630	2913	3061	3991	4642	6670

Sumber: BPS dan Departemen Kehutanan

Negara-negara yang menjadi tujuan ekspor kayu lapis sebagian besar berada di kawasan Asia timur dan Amerika. Perkembangan nilai dan volume ekspor paling drastis terjadi pada negara Jepang karena pada tahun 1980 volume ekspor hanya 5.897.000 kg dengan nilai 2.907.600 US\$ namun pada tahun 1982 jumlah ekspor ke negara ini meningkat tajam menjadi 22.189.200 kg dan pada tahun 1997 bahkan sudah mencapai 1.822.137.400 kg dengan nilai ekspor sebesar 1.323.974.700 US\$. Sejak tahun 1998, baik volume dan nilai ekspor kayu lapis ke negara Jepang mulai mengalami periode penurunan (tabel III-6). Negara lain yang menjadi pangsa pasar utama ekspor kayu lapis dari Indonesia adalah Amerika. Berdasarkan data yang terdapat pada tabel III-7 terlihat bahwa awalnya yaitu pada tahun 1980an volume dan nilai ekspor ke Amerika Serikat jauh lebih besar dibandingkan ke Jepang. Akan tetapi yang terjadi beberapa tahun kemudian ekspor kayu lapis ke Jepang justru bisa melebihi ekspor ke ke negara tersebut.

**Tabel III-6**  
**Volume dan Nilai Ekspor Kayu Lapis Indonesia ke Jepang**  
**Tahun 1980-2006**

Tahun	Berat Bersih	Nilai FOB
1980	5897	2907.6
1981	6007.4	2235.5
1982	22189.2	6995
1983	28864.6	8504.5
1997	1822137.4	1323974.7
1998	1224884.5	538094.1
1999	1546007.3	889791.9
2000	1546275.5	845796.7
2001	1561312.5	753009.8
2002*	1485.9	743.8
2003	1161.1	628.6
2004	1057.5	686.5
2005	887.6	578.7
2006	831	738.9

Sumber: BPS Statistik Indonesia 1984, 2002, 2007

Keterangan: Periode 1980 - 2001, berat bersih (000 kg) dan Nilai FOB (000 US\$)

\*Periode 2002 - 2006, berat bersih (000 M.Ton) dan Nilai FOB (000 000 US\$)

**Tabel III-7**  
**Ekspor Kayu Lapis menurut Negara Tujuan Utama**  
**Tahun 1980-2006**

Negara Tujuan	1980	1981	1982	1997	1998	1999	2001	2006**
<b>Jepang</b>								
Volume	5897	6007.4	22189.2	1822137	1224885	1546007	1561313	831000
Nilai	2907.6	2235.5	6995	1323975	538094.1	889791.9	753009.8	738900
<b>Hongkong</b>								
Volume	66873	85613.4	170580.4	302294	361201.1	161732.4	90023.3	23900
Nilai	22361.2	29115.6	66683.9	203220	132701.2	81526.8	35998.5	16500
<b>Korea Selatan</b>								

Lanjutan								
Volume	2478.5	4343.6	1152.2	257743	189364.1	250110.5	282590.6	159300
Nilai	640.7	1045.4	337.5	173298	65426.7	117519.9	114999.8	68000
Singapura								
Volume	33829.5	69991.1	121972.1	25922	120639.3	93176.5	75074.4	-*)
Nilai	11706	24785	45455.3	21330.4	44494.4	41593.7	27343.6	-
Malaysia								
Volume	258.9	412.4	1082.7	14984.1	13104.6	9480.9	13636.5	-
Nilai	114.9	187.3	339.8	11353.9	6992.7	5583	5820.4	-
Amerika Serikat								
Volume	17483.6	48675.6	122823.8	407859	517484.6	467462.7	363491.9	151600
Nilai	2242.4	22730.7	36441.5	347250	270770.6	304026.6	209324	127800

Sumber: Statistik Indonesia BPS diolah dari berbagai tahun

Volume (000kg); Nilai (000US\$)

\*\*) Volume (000M.Ton); Nilai (juta US\$)

\*) (-) menunjukkan data tidak tersedia

Peningkatan ekspor ke negara-negara di Asia (terutama Jepang) dibandingkan ke Amerika pada tahun terkait dengan dua alasan (Roesad, 1996). Pertama adalah karena adanya peralihan penggunaan jenis kayu lapis dari kayu lapis keras (*hardwood plywood*) ke jenis yang lebih murah yaitu kayu lapis lunak (*softwood plywood*). Berdasarkan bahan bakunya, kayu lapis memang dibedakan menjadi dua yaitu kayu lapis jenis *hardwood* dan *softwood*.<sup>7</sup> Negara Indonesia sebagai negara yang beriklim tropis banyak ditumbuhi kayu-kayu yang cocok untuk diproduksi menjadi kayu lapis keras. Adapun untuk bahan baku kayu lapis lunak banyak terdapat di negara yang beriklim subtropis seperti di Eropa, Amerika Utara dan Rusia. Alasan yang kedua terkait dengan semakin meningkatnya kepedulian sebagian besar negara-negara maju terhadap masalah lingkungan yaitu

<sup>7</sup>Kayu lapis keras (*hardwood plywood*) dibuat dari bahan baku yang berasal dari kayu berjenis keras dan biasanya berdaun lebar serta banyak tumbuh didaerah yang beriklim tropis. *Hardwood plywood* mempunyai keunggulan dibandingkan dengan *softwood plywood* diantaranya tekstur permukaan yang unik dan halus serta dapat dibuat lebih tipis (tebal 2mm) dan dapat dibuat balok yang panjang. Kayu lapis lunak (*softwood plywood*) merupakan jenis kayu lapis yang bahan bakunya berasal dari kayu berjenis lunak atau biasanya kayu yang berdaun jarum.

mengenai penerapan *ecolabelling*.<sup>8</sup> Dari tahun ke tahun, pemikiran mengenai pentingnya sertifikasi *eco labell* semakin meningkat sehingga sangat mempengaruhi pertumbuhan ekspor kayu lapis Indonesia. Hal lain yang juga menjadi penyebab mulai menurunnya kinerja ekspor kayu lapis pada tahun 1997 yaitu krisis ekonomi yang melanda sebagian besar negara-negara di Asia sehingga mempengaruhi kondisi keuangan negara-negara tersebut dalam membiayai proyek-proyek pembangunan. Imbasnya, permintaan impor kayu lapis dari Indonesia menurun.

### III.1.3 Sistem Perdagangan Industri Kayu Lapis

Pada masa orde baru, industri kayu lapis nasional merupakan salah satu industri yang selalu mendapat prioritas dalam pengembangannya dibandingkan dengan industri pengolahan kayu lainnya. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan dan peraturan yang sangat mendukung pengembangan industri kayu lapis nasional mulai dari kegiatan produksi hingga pemasaran. Peran serta pemerintah dalam mengatur produksi kayu lapis nasional sangat menonjol melalui berbagai kebijakan yang dikeluarkan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun untuk kegiatan yang terkait dengan perdagangan dan pemasaran kayu lapis, Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) yang memegang peranan penting. Asosiasi Panel Kayu Indonesia (APKINDO) yang berdiri pada tanggal 12 Pebruari 1976 diposisikan sebagai wadah kerjasama antar pengusaha dalam industri kayu lapis di Indonesia. Asosiasi ini dibentuk sebagai langkah antisipatif untuk menghadapi perkembangan produksi kayu lapis yang semakin meningkat dengan pesat sehingga memerlukan pengelolaan yang baik terutama

---

<sup>8</sup> Menurut departemen Kehutanan, *ecolabelling* di bidang perikanan adalah suatu cara untuk memberikan informasi kepada konsumen mengenai produk kayu yang dipasarkan kepadanya bahwa kayu tersebut dihasilkan dari suatu konsensi hutan yang dikelola atas dasar kelestarian sumber daya dan ekosistem dari lingkungan hidup. Dimulai dari pengambilan bahan baku (misalnya kayu), pengangkutan bahan baku ke pabrik, proses dalam pabrik, pengangkutan produk pabrik ke konsumen, pemakaian produk dan pembuangan sampahnya (bekas pakai dari produk) secara keseluruhan tidak mencemari lingkungan (akrab lingkungan). Pendekatan Silabus hidup (*Life Cycle*) ini dikenal sebagai pendekatan "*From Cradle to Grove* (dari lahir sampai ke kuburan)".

dalam perdagangannya agar melimpahnya jumlah produksi tersebut tidak sampai membuat industri ini justru terpuruk. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum penawaran, peningkatan jumlah penawaran suatu barang atau jasa akan membuat harga yang terjadi semakin menurun. Oleh karena itu, APKINDO berupaya mengatur perdagangan kayu lapis Indonesia terutama untuk pasar luar negeri.

Peranan APKINDO dalam mengatur perdagangan kayu lapis di Indonesia dinilai sangat besar. Pada masa itu, walaupun Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kayu lapis terbesar di dunia (tabel III-8), keberadaan pesaing produsen kayu lapis dari negara lain tetap harus dipertimbangkan. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar produksi kayu lapis nasional diperuntukkan untuk pasar ekspor sehingga Indonesia harus mampu bersaing dengan negara lainnya.<sup>9</sup> Dengan adanya APKINDO diharapkan dapat membantu melindungi para produsen kayu lapis domestik di tengah ketatnya persaingan dalam perdagangan internasional.

**Tabel III-8**  
**Negara Produsen Kayu Lapis Terbesar di Dunia**  
**(000M3) Tahun 1993-2001**

Negara	Tahun						
	1993	1994	1995	1996	1997	1999	2001
Canada	1824	1834	1831	1814	1830	2228	2326
USA	17093	17380	17140	16975	17517	17551	16446
China	2639	3124	8104	5414	8098	8103	9856
Indonesia	10050	9836	9500	9575	9600	7500	7300
Jepang	5263	4865	4421	4311	4257	3261	2771
Korea	898	886	974	896	1014	774	801
Malaysia	2821	3713	3996	4100	4447	4123	4318
Brazil	1575	1870	1900	1900	1200	2200	2470

Sumber: FAO yearbook 1997 dan 2001

<sup>9</sup> Sebesar 80% dari total output industri kayu lapis dialokasikan untuk ekspor sehingga kemampuan bertahan industri ini sangat bergantung pada pasar ekspor (Indonesia Commercial Newsletter, 27<sup>th</sup> February 1998).

Keterlibatan APKINDO dalam mengatur perdagangan kayu lapis sangat besar dirasakan terutama untuk pemasaran kayu lapis di luar negeri. APKINDO menentukan kuota ekspor<sup>10</sup> untuk masing-masing produsen kayu lapis domestik sesuai dengan pembagian wilayah pemasarannya atau dengan kata lain APKINDO menentukan siapa pembeli kayu lapis Indonesia di luar negeri. Penetapan harga ekspor kayu lapis pun dilakukan oleh APKINDO dengan tujuan agar menjamin bahwa harga yang dibayarkan kepada produsen kayu lapis di Indonesia mendapatkan harga yang sesuai dengan kondisi wilayah pemasarannya.

APKINDO melakukan berbagai upaya untuk membuat agar kayu lapis Indonesia bisa mempunyai posisi yang bagus di pasar perdagangan internasional diantaranya dengan membentuk tujuh Badan Pemasaran Bersama (BPB). Lembaga yang merupakan perpanjangan tangan APKINDO ini diperkuat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.1198/KP/84 dan mempunyai peran untuk mengontrol keadaan pasar kayu lapis baik di dalam maupun di luar negeri. Lima BPB dibentuk berdasarkan pertimbangan geografis sedangkan dua lainnya dibentuk untuk mengontrol pasar yang terkait dengan pemasaran produk baru dan pemasaran untuk pasar di dalam negeri. BPB yang dibentuk berdasarkan pertimbangan geografis dibagi atas beberapa wilayah yaitu BPB untuk wilayah Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Cina, dan negara-negara yang merupakan negara tujuan ekspor yang baru seperti Australia dan Taiwan. Pembagian tiap wilayah ini didasari alasan karena tiap wilayah mempunyai kondisi dan karakteristik pasar yang berbeda-beda seperti kondisi ekonomi, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan kayu lapis serta pasar kayu lapis di wilayah tersebut sehingga akan mempengaruhi kebijakan pemasaran kayu lapis yang akan diterapkan di wilayah tersebut seperti penetapan

---

<sup>10</sup> Pembagian kuota ekspor diatur dengan mempertimbangkan besarnya ekspor yang dilakukan eksportir pada periode sebelumnya serta kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang diterapkan. Dalam SK Menteri Perdagangan No.56/DAGLU/Kp/IV/86 dijelaskan bahwa pembagian jatah ekspor (kuota) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Cq. Direktur Ekspor Hasil Industri dan Pertambangan dengan tembusan kanwil perdagangan dan APKINDO.

kuota dan harga ekspor kayu lapis. APKINDO beranggapan dengan pengontrolan dan pengaturan yang dilakukannya dapat membuat posisi kayu lapis Indonesia di pasar luar negeri senantiasa berada dalam kondisi yang bagus dan stabil. Oleh karena itu, bagi produsen kayu lapis yang ingin melakukan ekspor harus mendapat izin persetujuan dari BPB. Selain itu, APKINDO juga membentuk Komisi Pemasaran (Kompa) dengan maksud sebagai penentu kebijaksanaan pemasaran kayu lapis Indonesia di pasar internasional berdasarkan pantauan perkembangan harga dan situasi pasar kayu lapis dunia yang dilakukan oleh Tim Stabilitas Harga (TSH) yang juga merupakan bentukan APKINDO.

Jalur pemasaran kayu lapis domestik ke luar negeri hanya bisa dilakukan melalui APKINDO. Oleh karena itu sebelum tahun 1998, seluruh produsen kayu lapis merupakan anggota APKINDO sebab tanpa APKINDO mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa untuk memasarkan produk kayu lapis. Hal inilah yang melatarbelakangi tuduhan praktek monopoli yang dilakukan oleh APKINDO. Para produsen kayu lapis dalam negeri hanya bisa memproduksi kayu lapis namun untuk pemasarannya terutama untuk pasar luar negeri diambil alih oleh APKINDO (*The Jakarta Post*, 27 Januari 1998).

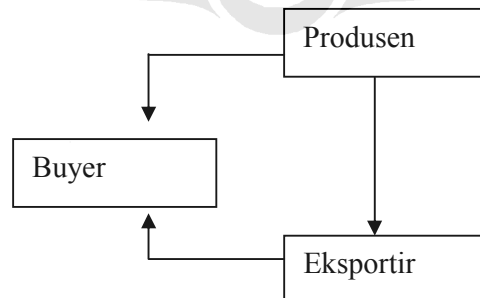
Reformasi yang terjadi di Indonesia juga mengenai industri kayu lapis. Melalui penandatanganan kesepakatan dengan IMF pada Januari 1998, menteri perdagangan dan perindustrian mencabut ketentuan-ketentuan pembatasan perdagangan kayu lapis dalam hal pengaturan pemasaran, pemungutan iuran atau komisi, penetapan volume produksi, serta pangsa pasar (CIC, 1998). Beberapa peraturan baru kemudian di buat sebagai tindak lanjut dari penandatanganan kesepakatan tersebut, diantaranya:

1. SK Menperindag No.26/MPP/Kep/1/1998 tentang pencabutan tata niaga ekspor kayu lapis.
2. SK Menperindag No.27/MPP/Kep/1/1998 tentang penghapusan kelompok (badan) pemasaran bersama (BPB) kayu lapis.

3. SK Menperindag No.28/MPP/Kep/1/1998 tentang ketentuan ekspor kayu lapis.
4. SK Menperindag No.29/MPP/Kep/1/1998 tentang pencabutan jatah ekspor kayu lapis.

Dengan dikeluarkannya aturan-aturan baru tersebut maka peranan APKINDO dalam industri kayu lapis domestik tidak lagi mendominasi. Meskipun demikian, keberadaan APKINDO hingga saat ini masih bertahan walaupun keterlibatannya dalam industri kayu lapis tidak sebesar sebelum penandatanganan kesepakatan dengan IMF. Sebagai bukti, pada 1 Juli 2002 APKINDO membentuk Badan Pengawas Produksi (BPP) yang bertujuan untuk memantau ketersediaan bahan mentah dan kapasitas produksi dari pabrik, ekspor, dan penjualan di pasar dalam negeri, serta memberikan informasi pasar kepada anggota dan negara-negara pemakai (Visidata Riset Indonesia, 2002). Badan Pengawas Produksi (BPP) dibentuk bukan untuk mengatur harga dan kuota perdagangan kayu lapis sehingga produsen kayu lapis bisa dengan bebas memasarkan hasil produksinya tanpa harus melalui APKINDO lagi. Untuk mengekspor kayu lapis, produsen mempunyai sub divisi ekspor atau merangkap sebagai eksportir kemudian dikirim ke buyer yang sebagian besar dilakukan oleh perusahaan eksportir (Data Biz, 2005).

**Gambar III-2**  
**Sistem Distribusi Kayu Lapis ke Luar Negeri**



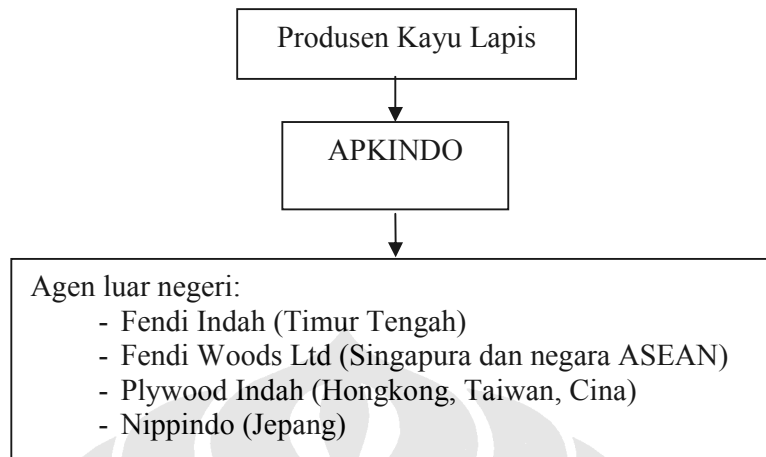
Sumber: Data Biz, 2005



Mekanisme perdagangan dengan alur tersebut lebih sederhana dan ringkas dibandingkan dengan mekanisme perdagangan ketika diatur oleh APKINDO. Sebelumnya, produsen kayu lapis yang ingin mengekspor kayu lapis terlebih dahulu harus mendapatkan izin mengenai kuota ekspor yang diperbolehkan termasuk wilayah pemasarannya yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan APKINDO dan kanwil Perdagangan. APKINDO kemudian akan memasarkan kayu lapis ke luar negeri melalui perantara Badan Pemasaran Bersama (BPB) yang masing-masing sudah mempunyai agen perdagangan di luar negeri. Dengan demikian kontak antara penjual dan pembeli harus melalui perantara APKINDO.

Jika pemasaran kayu lapis ke luar negeri terkesan begitu mendapat berbagai peraturan lain halnya dengan pemasaran kayu lapis di dalam negeri. Produsen kayu lapis lebih mendapatkan kebebasan untuk menjual kayu lapis dengan diperbolehkannya mereka menjual kepada siapa saja pembeli yang berminat namun tetap dalam pengawasan APKINDO. Akan tetapi jumlah ekspor kayu lapis yang terus meningkat menimbulkan kekhawatiran pembeli di dalam negeri karena kalau pasokan kayu lapis dalam negeri sampai berkurang maka bisa dipastikan harga akan meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.128/KP/IV/86 pada tanggal 21 April 1986 mengenai kuota ekspor kayu lapis untuk pasar tradisional yang bertujuan untuk menstabilkan harga. Dengan demikian diharapkan bahwa pasokan kayu lapis untuk pasar domestik tetap terjaga ketersediannya.

**Gambar III-3**  
**Alur Pemasaran Kayu Lapis ke Luar Negeri**  
(versi APKINDO)



Sumber: APKINDO

## **III.2 Pengelolaan Sumber Bahan Baku Kayu Lapis di Indonesia**

### **III.2.1 Pengaturan Pengelolaan Hutan melalui HPH**

Pertumbuhan investasi yang sangat cepat terjadi pada sektor kehutanan sudah tidak diragukan lagi dan telah mampu memberi kontribusi yang besar terhadap perekonomian. Pada tahun 2000, sektor kehutanan mampu menghasilkan devisa sebesar US\$ 8.5 miliar atau 19.71% dari nilai ekspor non migas. Kontribusi besar yang diberikan sektor kehutanan termasuk didalamnya industri pengolahan kayu terhadap perekonomian sangat terkait erat dengan kebijakan yang menyertainya terutama mengenai pengurusan pengelolaan hutan di Indonesia.

Industri kayu lapis merupakan industri yang sangat bergantung pada pasokan kayu bulat sebagai bahan baku utamanya. Pada masa orde baru, kebutuhan ini dipenuhi dari kayu-kayu hutan yang berasal dari hutan produksi.<sup>11</sup> Pengelolaan hutan diawali dengan dikeluarkannya undang-undang dasar kehutanan yang berisi ketentuan pokok

<sup>11</sup> Menurut rencana Tata Guna Hutan Kesepakatan (RTGHK) yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan, fungsi dan peruntukan hutan secara umum dapat dibedakan menjadi lima kelompok, yaitu hutan lindung, hutan suaka alam dan hutan wisata, hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, serta hutan produksi yang dapat dikonversi.

kehutanan yang diatur dalam UU No.5 tahun 1967. Pada pasal 1 UU ini, pemerintah diberi kewenangan untuk mengatur peruntukkan dan pemberian izin pemanfaatan hutan. Adapun pasal 13 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan menggalakkan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi dan kemakmuran rakyat. Akan tetapi sebagaimana diketahui bahwa keadaan keuangan pemerintah pada masa itu sangat sulit sehingga pemerintah tidak mempunyai cukup modal untuk membiayai proyek-proyek pembangunan termasuk investasi di sektor kehutanan.

Kondisi tersebut melatarbelakangi dikeluarkannya UU No.1 tahun 1967 mengenai Penanaman Modal Asing (UU-PMA) dan disusul kemudian pada tahun 1968 pemerintah kembali mengeluarkan UU No. 6 tahun 1968 mengenai Penanaman Modal Dalam Negeri (UU-PMDN). Dengan dikeluarkannya kedua undang-undang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Indonesia maka diharapkan pendapatan negara akan turut mengalami peningkatan seiring meningkatnya peran investor dalam perekonomian. Kedua undang-undang ini banyak memberikan kelonggaran mengenai batasan usaha yang boleh dilakukan oleh para pemilik modal termasuk kelonggaran dalam investasi di bidang pemanfaatan hutan. Padahal jika mencermati pasal 33 UUD 1945 disebutkan bahwa “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” sehingga semestinya pengelolaan dan pemanfaatan hutan menjadi tanggung jawab sepenuhnya pemerintah sebab pemerintah merupakan perwujudan wakil negara atau dengan kata lain hutan merupakan bidang usaha yang tertutup untuk PMA (Saman, 1993). Akan tetapi apa daya pemerintah sendiri tidak mempunyai cukup kemampuan untuk melakukannya sehingga membutuhkan modal dari investor. Adapun dalam pengaturan pengelolaan hutan, ditetapkanlah UU No. 5 tahun 1967 dan khususnya Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1970 mengenai kewenangan untuk

mengelola dan memanfaatkan hutan yang diatur melalui pemberian konsesi Hak perusahaan hutan (HPH) dan hak pemungutan hasil hutan (HPHH).<sup>12</sup>

Sistem eksploitasi hutan melalui pemberian kepemilikan konsesi dalam bentuk HPH semakin meningkatkan peran investor dalam pemanfaatan hutan di Indonesia. Hal ini mengakibatkan perkembangan HPH di Indonesia terus mengalami peningkatan. Akan tetapi selama kurun waktu 15 tahun terakhir hingga tahun 2005, jumlah HPH terus menurun (tabel III-9). Hal ini diantaranya disebabkan oleh semakin ketatnya pengawasan terhadap pengelolaan hutan terutama dalam pemberian HPH yang dilakukan oleh Departemen Kehutanan seiring banyaknya desakan dari berbagai pihak menyangkut pengelolaan hutan berdasarkan prinsip *sustain forest management*.

**Tabel III-9**  
**Perkembangan HPH Hutan Alam**  
**Tahun 1991-2005**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Luas Areal (Juta Ha)</b>
1991	567	60.48
1992	580	61.38
1993	575	61.7
1994	540	61.03
1995	487	56.17
1996	447	54.09

<sup>12</sup> Menurut Peraturan Pemerintah No.21/1970, HPH adalah suatu hak untuk mengusahakan hutan di suatu wilayah hutan yang telah ditentukan dengan cara menebang kayu, melakukan permudaan dan memelihara hutan, dan memroses serta memasarkan produk-produk hutan sesuai dengan Rencana Kerja Perusahaan Hutan, sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan berdasarkan pelestarian serta produksi yang berkelanjutan. Pemegang HPH adalah suatu badan hukum yang diberikan oleh pemerintah melalui Departemen Kehutanan. Adapun yang dimaksud dengan Hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH) adalah hak untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) hektar untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun serta untuk mengambil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Pemberian HPHH dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Kehutanan propinsi baik kepada badan hukum maupun perseorangan.

1997	427	52.28
1998	420	51.58
1999	387	41.84
2000	362	39.16
2001	351	36.42
2002	270	28.08
2003	267	27.8
2004	287	27.82
2005	285	27.72

Sumber: Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan

### III.2.1 HPH, Illegal Logging, serta Kelangsungan Produksi Kayu Lapis

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri kayu lapis saat ini yaitu masalah bahan baku kayu yang semakin berkurang. Ironis sekali bahwa di negara yang merupakan salah satu pemilik hutan terluas di dunia, sampai kekurangan bahan baku kayu gelondongan. Terciptanya situasi seperti ini sangat terkait erat dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya mengenai pengelolaan hutan. Lemah atau bahkan tidak adanya pengawasan terhadap pelaksanaan HPH menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran dalam penggunaan HPH. Luas areal hutan yang dieksplorasi seringkali melebihi ketentuan dalam izin HPH yang diberikan.

Selain masalah bahan baku, industri ini mengalami penurunan daya saing yang berkaitan dengan maraknya masalah *illegal logging* dan *illegal trade* yang muncul sebagai implikasi dari pemberlakuan kebijakan pelarangan ekspor kayu gelondongan sehingga pasokan kayu gelondongan dari Indonesia berkurang sementara itu permintaannya terus meningkat. Gonensay (1966) mengemukakan bahwa *black market* timbul karena adanya *excess demand* pada *official price* atau dengan kata lain perbedaan harga antar pasar akan

mendorong terjadinya *illegal trade (black market)*. Insentif perbedaan harga yang mendorong terjadinya aktivitas *illegal trade* ini tak bisa dilepaskan dari *high cost economy* yang harus dihadapi para pengusaha industri ini jika melalui *legal trade*, seperti Pungutan Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Sodikin (2005) mengatakan bahwa pungutan yang harus ditanggung oleh industri kehutanan sangat besar karena selain pungutan resmi masih harus ditambah dengan pungutan-pungutan liar lainnya yang diperkirakan mencapai 10-12 persen dari biaya produksi per meter kubik kayu legal sehingga hal ini mendorong konsumen mencari barang dengan harga lebih murah dan pilihannya jatuh pada kayu ilegal. Pada akhirnya *high cost economy* tersebut akan semakin membebankan harga jual produk industri kayu lapis dan menekan keuntungan yang bisa diperoleh oleh pengusaha industri ini. Sebaliknya, dengan *illegal logging* maupun *illegal trade*, masalah ini dapat dihindarkan. Pangsa pasar untuk kayu hasil *illegal logging* ini sebagian besar untuk pasar Singapura, Malaysia, dan Cina.<sup>13</sup>

### **III.3 Hambatan dan Prospek Pengembangan Industri Kayu Lapis**

#### **III.3.1 Hambatan**

Kemampuan industri kayu lapis untuk berkembang dan menjadi produk kehutanan yang menghasilkan devisa non-migas yang besar bagi negara sangat disayangkan harus berhenti saat ini. Industri kayu lapis sudah terlalu berat menanggung banyaknya beban permasalahan yang hingga kini belum bisa ditemukan solusi yang tepat. Pada perkembangannya terutama dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini, secara keseluruhan industri kayu lapis mengalami tren pertumbuhan yang menurun.

Menurut studi yang dilakukan oleh CIC (1998), penyebab penurunan tersebut dapat berasal baik dari faktor internal (dalam negeri) maupun faktor eksternal. Dari dalam

---

<sup>13</sup> "Singapura dan Malaysia Penampung Selundupan Kayu Terbesar" dalam <http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa/sulawesi/2003/09/12/brk,20030912-36.id.html>

negeri saja, para produsen kayu lapis harus menanggung beban persoalan yang begitu banyak dan belum ditemukan solusi yang tepat hingga saat ini. Permasalahan utama yang harus dihadapi yaitu mengenai semakin berkurangnya ketersediaan kayu gelondongan hasil hutan alam sebagai bahan baku utama industri ini. Padahal sebagaimana diketahui bahwa kelangsungan dan kelancaran proses produksi sangat bergantung pada ketersediaan bahan bakunya. Ketidakseimbangan antara permintaan dan kemampuan *supply* kayu gelondongan untuk industri ini selain terkait erat dengan besarnya kapasitas produksi pabrik-pabrik kayu lapis yang beroperasi di Indonesia juga disebabkan karena adanya kebijakan mengenai pembatasan pengambilan kayu hutan alam sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pada sisi lain, kemampuan untuk mensubstitusi bahan baku kayu gelondongan dari hutan alam dengan kayu yang berasal dari hutan tanaman industri atau bahkan kayu-kayu dari perkebunan masih sangat rendah. Hal ini dikarenakan sebagian besar mesin-mesin pengolahan yang dipergunakan pada pabrik kayu lapis sudah tua umurnya dimana teknologinya hanya bisa memproses kayu-kayu dengan diameter besar sehingga menyebabkan rendahnya efisiensi pabrik-pabrik kayu lapis di Indonesia.<sup>14</sup> Selama ini industri kayu lapis memang hanya dikenal sebagai industri yang berbasis sumber daya alam dan padat tenaga kerja sehingga banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya industri ini juga butuh mengikuti perkembangan teknologi. Kenyataannya, pemerintah Indonesia sekalipun seakan tidak menyadari hal ini. Hingga saat ini, industri kayu lapis tetap masuk di dalam daftar investasi negatif (Roesad, 1996) padahal untuk bisa mengejar ketertinggalan teknologi, produsen kayu lapis membutuhkan investasi yang tidak sedikit.<sup>15</sup>

Restrukturisasi permesinan perlu segera dilakukan karena mesin-mesin yang dimiliki

---

<sup>14</sup> Kayu-kayu yang berasal dari hutan alam tropis umumnya mempunyai diameter yang besar karena sudah berumur puluhan bahkan ratusan tahun. Sementara itu, kayu-kayu yang bersal dari HTI maupun perkebunan umumnya dalam waktu relatif singkat sudah bisa dipanen sehingga bisa dipastikan bahwa diameter kayunya pun kecil. Pada saat ini sudah banyak beredar di pasaran mesin-mesin yang digunakan dalam pabrik kayu lapis yang bisa memproses kayu-kayu dengan diameter kecil sehingga sebenarnya bisa mengurangi ketergantungan terhadap kayu-kayu yang berasal dari hutan alam.

<sup>15</sup> Pemerintah memutuskan bahwa jumlah pabrik kayu lapis yang ada saat ini sudah memadai sehingga masuknya investasi baru dinilai akan mengganggu keseimbangan pasok kayu gelondongan. Hal inilah yang mengakibatkan produsen kayu lapis kesulitan mendapatkan investasi modal yang sangat dibutuhkan terutama untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas terutama melalui pembelian mesin-mesin yang baru.

industri kayu Indonesia saat ini umumnya sudah tua sehingga tidak efisien akibat borosnya bahan baku yang harus digunakan sementara produksi kayu dari hutan mulai langka.<sup>16</sup> Restrukturisasi ini membutuhkan biaya dan modal yang besar sementara pelaku industri mengalami kesulitan untuk memperoleh pinjaman baik dari perbankan maupun lembaga keuangan lainnya (Databiz Riset Indonesia, 2007).

Industri kayu lapis yang pernah menjadi primadona tersebut tidak berhenti menghadapi berbagai permasalahan sampai disini. Produsen kayu lapis juga harus menghadapi hambatan perdagangan berupa ketatnya persaingan terutama dengan hadirnya negara-negara produsen kayu lapis baru seperti Malaysia dan China. (Gunarto, 2002). Meskipun kemampuan produksi kayu gelondongan Indonesia berada di atas Cina dan Malaysia namun kemampuan produksi kayu lapis kedua negara tersebut hampir menyamai kemampuan produksi kayu lapis Indonesia. Pada tahun 2004 serta tahun 2005, produksi Malaysia bahkan melebihi kayu lapis yang bisa diproduksi oleh Indonesia (Grafik 3-2 dan 3-3). Kondisi tersebut dikhawatirkan akan semakin banyak mematikan industri kayu lapis di Indonesia pada masa pada masa yang akan datang. Kendala eksternal lain yang juga menjadi permasalahan adalah menyangkut diskriminasi tarif bea masuk untuk produk kayu lapis asal Indonesia (Astono, 2006). Lebih lanjut seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran terhadap permasalahan lingkungan, kini semakin banyak negara-negara maju yang mensyaratkan dipenuhinya sertifikasi ecolabel untuk produk yang masuk ke negaranya. Indonesia bisa saja menolak sertifikasi ecolabel namun konsekuensinya Indonesia harus rela kehilangan pasar ekspor kayu lapis terutama untuk negara-negara maju yang telah menerapkan konsep *ecolabelling* (Gunarto, 2002). Padahal biaya untuk mendapatkan sertifikasi mahal yaitu antara US\$ 30.000 hingga US\$ 40.000 per masing-masing pemegang ijin (Roesad, 1996). Biaya ini tentu saja akan semakin membebani biaya

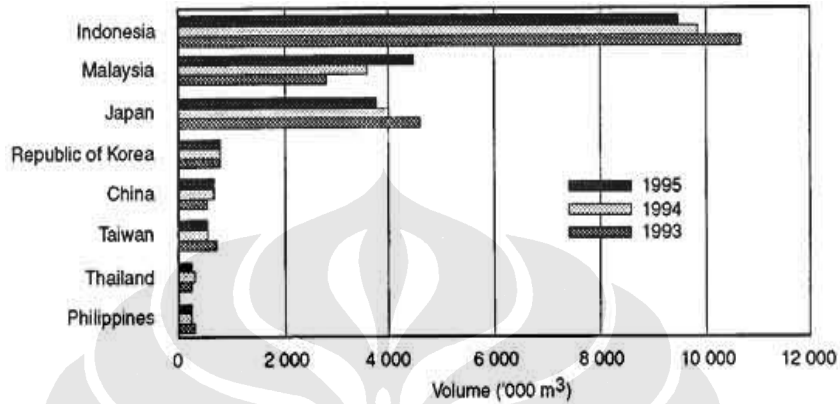
---

<sup>16</sup> “Kayu Lapis Indonesia Belum Mampu Manfaatkan Pasar Global” dalam <http://www.kapanlagi.com/h/0000126778.html>



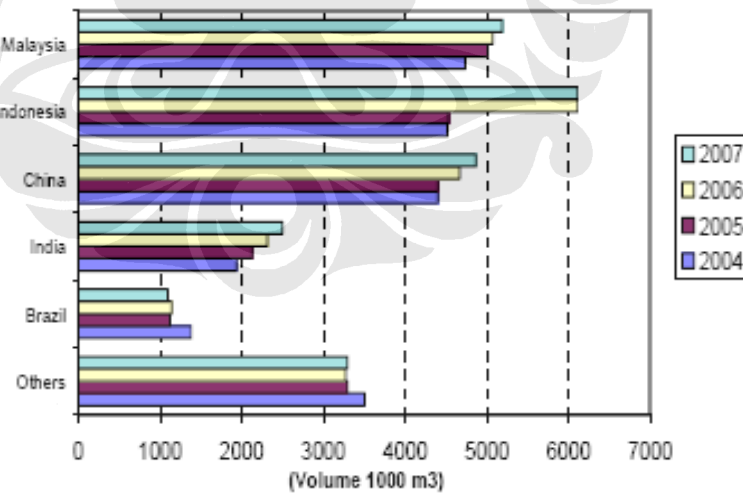
produksi kayu lapis yang pada akhirnya dikhawatirkan dapat membuat kayu lapis asal Indonesia kehilangan *competitiveness* terutama jika dibandingkan kayu lapis asal Cina.

**Grafik III-2**  
**Perbandingan Produksi Kayu Gelondongan Antar Negara**



Sumber: ITTO, 1997

**Grafik III-3**  
**Perbandingan Produksi Kayu Lapis Antar Negara**



Sumber: ITTO, 2007

### III.3.2 Prospek

Seiring semakin meningkatnya laju deforestasi hutan di Indonesia disertai dengan pengawasan kehutanan yang mulai semakin ketat, industri kayu lapis di Indonesia diperkirakan akan semakin sulit berkembang. Selain itu, terjadinya pergeseran permintaan kayu lapis dari jenis *hardwood plywood* ke *softwood plywood* yang harganya lebih murah membuat produk kayu lapis asal Indonesia semakin sulit untuk bertahan di pasar internasional. Fokus pengembangan industri berbasis kehutanan saat ini cenderung bergerak pada pengembangan industri bubur kertas dimana program pembangunan hutan tanaman industri (HTI) untuk menjamin ketersediaan pasokan bahan bakunya sudah berjalan sebagaimana diharapkan.

Industri kayu lapis di Indonesia meskipun kedepannya tidak bisa lagi diharapkan menjadi industri unggulan di masa depan namun masih tetap mempunyai sedikit celah prospek untuk berkembang. Hal ini didasari oleh adanya kabar bahwa Asosiasi Industri Kayu Lapis Malaysia mulai mendapat tekanan di pasar Inggris Raya agar produknya tidak diperbolehkan masuk karena bahan bakunya diduga berasal dari kayu selundupan (Sinar Harapan, Juni 2002). Hal ini tentunya memberikan peluang bagi industri kayu lapis di Indonesia untuk kembali merebut pasar yang sebelumnya dikuasai oleh Malaysia karena sebagaimana diketahui bahwa selain Cina, Malaysia juga merupakan pesaing berat Indonesia dalam hal pemasaran kayu lapis karena kedua negara tersebut mampu menjual produk kayu lapis buatannya dengan harga yang lebih kompetitif. Seiring dengan semakin gencarnya operasi pemberantasan illegal logging yang dilakukan oleh Indonesia, pasokan bahan baku kayu ke Cina dan Malaysia pun diprediksikan akan berkurang karena selama ini kedua negara tersebut merupakan negara tujuan utama pengiriman kayu selundupan dari Indonesia.<sup>17</sup> Selain itu, jika dianalisis lebih lanjut maka sebenarnya industri ini masih

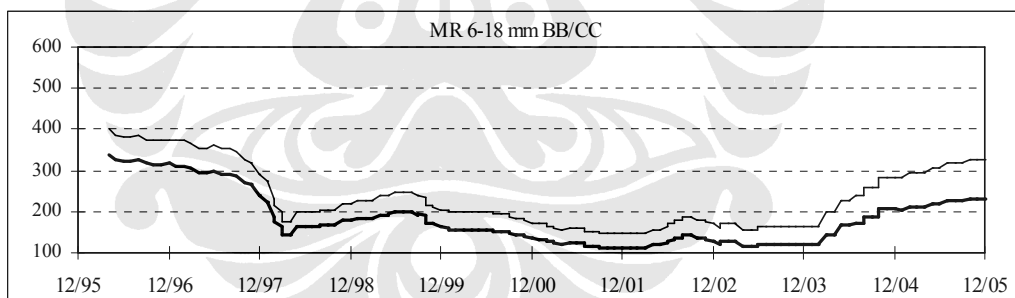
---

<sup>17</sup> Malaysia dan Cina Krisis Bahan Baku, RI Berpotensi Dominasi Pasar panel Kayu Dunia dalam <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/agribisnis/1id34778.html> diakses 14 Mei 2008

mempunyai prospek pengembangan yang cerah kedepannya. Hal ini didasari oleh kenyataan Indonesia masih mempunyai cukup besar potensi hutan yang belum dikembangkan seperti di Irian Jaya sehingga dapat menjadi sumber bahan baku bagi industri kayu lapis. Kekhawatiran akan tidak tersedianya cukup bahan baku untuk industri kayu lapis sebenarnya tidak cukup beralasan mengingat dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini maka dengan kayu-kayu berdiameter kecil pun dapat digunakan untuk memproduksi kayu lapis dengan kualitas yang sebanding.

Menurut APKINDO, industri kayu lapis di Indonesia akan kembali dapat berkembang lebih pesat mengingat harga kayu lapis Indonesia di pasar internasional mulai kembali mengalami kenaikan.

**Grafik III-4**  
**Grafik Perkembangan Rata-Rata Harga Kayu Lapis Indonesia**  
**Untuk Pasar Ekspor Jepang**



Sumber: ITTO, 2006

## BAB V

### Hasil dan Pembahasan

#### V.1 Garis Besar Pembahasan

Secara umum, estimasi persamaan-persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada dua macam bentuk pengolahan data yaitu data *cross section* dan *pooled data*. Pengolahan data *cross section* terbagi atas tiga periode waktu yaitu:

- a. Periode 1993 - 1995
- b. Periode 1995 – 1997
- c. Periode 1997 – 1999

Penggunaan data yang tersensor ini dilakukan karena hanya perusahaan-perusahaan yang dapat bertahan hidup pada periode  $t$  dan  $t+2$  yang dilibatkan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, observasi perusahaan yang dipergunakan untuk tiap periode belum tentu merupakan perusahaan yang sama. Adapun estimasi persamaan regresi yang menggunakan *pooled data* dilakukan untuk menggabungkan antara data pada periode sebelum krisis (1993 – 1995) dan data untuk periode setelah krisis yaitu periode 1997 – 1999. *Pooled data* digunakan juga untuk menggabungkan seluruh sampel penelitian untuk melihat pengaruh variabel harga domestik dan harga internasional kayu lapis yang diproduksi oleh Indonesia terhadap pertumbuhan TFP-nya.

Hasil regresi yang telah dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan dapat dikatakan model-model yang digunakan dalam penelitian ini lemah. Pada tingkat keyakinan 95 persen, model-model yang dipergunakan hampir seluruhnya hanya memiliki tingkat keakuratan kurang dari 20 persen. Hal ini berarti

kemampuan model untuk menjelaskan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya sangat rendah.

## V.2 Analisa Deskriptif

Kemampuan perusahaan-perusahaan dalam industri kayu lapis untuk bertahan hidup baik pada periode  $t$  maupun  $t+2$  secara keseluruhan sangat rendah. Berdasarkan data yang tersedia di tahun 1993 terdapat 128 perusahaan dalam industri kayu lapis namun yang dapat bertahan hidup di tahun 1995 hanya sekitar separuhnya yaitu 62 perusahaan dari total 123 perusahaan yang ada pada tahun 1995 tersebut. Kemungkinan hal ini menunjukkan bahwa sebanyak 65 perusahaan yang ada pada tahun 1993 tersebut tidak dapat bertahan hidup (mati) sampai tahun 1995 atau kemungkinan lainnya adalah terjadi merger sehingga terbentuk perusahaan baru. Adapun untuk periode 1995–1997 dan periode 1997–1999, jumlah perusahaan yang dapat bertahan hidup meski secara kebetulan memiliki jumlah yang sama yaitu sebanyak 32 perusahaan namun hal ini tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang diobservasi merupakan perusahaan yang sama pada kedua periode tersebut. Perkembangan mengenai jumlah perusahaan yang terdapat dalam industri kayu lapis di Indonesia selama tahun 1993–1999, dirangkum dalam tabel 5-1 dibawah ini. Kemampuan perusahaan-perusahaan dalam industri kayu lapis yang secara keseluruhan dapat dikatakan rendah seringkali dijadikan alasan bahwa industri kayu lapis di Indonesia merupakan *sunset industry*. Berbagai permasalahan yang harus dihadapi oleh produsen kayu lapis di negeri ini mulai dari kesulitan mendapatkan bahan baku, beberapa kebijakan kehutanan yang dianggap tidak mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif hingga permasalahan pemasaran telah menyebabkan kemampuan bertahan perusahaan dalam industri ini sangat rendah.

**Tabel V-1**  
**Perkembangan Jumlah Perusahaan dalam Industri Kayu Lapis**  
**Tahun 1993 – 1999**

<b>Tahun <math>t</math></b>	<b>Jumlah Perusahaan</b>	<b>Jumlah Perusahaan yang dapat bertahan hidup pada <math>t+2</math></b>
1993	128	62
1995	123	32
1997	90	32
1999	70	-

Sumber: BPS diolah oleh penulis

Status kepemilikan perusahaan dalam industri kayu lapis ini pun mengalami trend pergeseran. Pada periode 1993-1995, kepemilikan perusahaan yang mampu bertahan pada periode tersebut hampir sebagian besar berstatus penanaman modal asing (PMA). Akan tetapi pada periode 1995-1997 dan 1997-1999 perusahaan-perusahaan yang mampu bertahan dalam industri kayu lapis di Indonesia justru hampir seluruhnya merupakan perusahaan dengan status kepemilikan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan lainnya (tabel V-2). Iklim usaha yang tidak kondusif akibat krisis ditambah dengan stabilitas sosial dan sistem hukum yang tidak berfungsi dengan baik serta semakin memburuknya keadaan hutan di Indonesia yang diantaranya disebabkan oleh kebakaran hutan telah mengakibatkan investor asing meninggalkan Indonesia.<sup>19</sup> Peranan investor asing dalam pengembangan industri kayu lapis di Indonesia padahal sangat penting. Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa pada awal pengembangan industri kayu lapis di Indonesia dibarengi dengan dibukanya kran penanaman modal asing (PMA) sebab peran investor asing dinilai sangat strategis dalam hal kepemilikan modal yang lebih kuat sehingga dapat lebih mempercepat pengembangan industri kayu lapis di tanah air. Akan tetapi seperti terlihat dalam tabel V-2, kepemilikan perusahaan kayu lapis oleh asing ternyata jumlahnya semakin jauh berkurang.

<sup>19</sup> "Saluran Hukum Tersumbat: Pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Industri Pulp dan Kertas di Sumatera, Indonesia." dalam <http://www.hrw.org/indonesian/reports/2003/01/indonbahasa0103-02.htm>

**Tabel V-2**  
**Perbandingan Status Kepemilikan Perusahaan dalam Industri Kayu Lapis**  
**Tahun 1993 – 1999**

Periode	PMA	PMDN dan lainnya
1993-1995	45	17
1995-1997	1	31
1997-1999	1	31
Total	47	79

Sumber: BPS diolah oleh penulis

Pada periode dimana jumlah kepemilikan modal asing menurun secara signifikan, pertumbuhan total faktor produktifitas industri kayu lapis turut menurun tajam. Pada periode 1993-1995 rata-rata pertumbuhan TFP masih sebesar 0.02 persen namun pada periode selanjutnya pertumbuhan TFP langsung turun menjadi -0.008 persen. Kondisi ini masih terus berlanjut hingga pada periode 1997-1999 dimana rata-rata pertumbuhan TFP industri kayu lapis di Indonesia hanya mencapai -0.106 persen.

**Tabel V-3**  
**Rata-rata Pertumbuhan Industri Kayu Lapis di Indonesia**  
**Tahun 1993-1999**

Tahun	Average TFP (%)
1993-1995	0.02303
1995-1997	-0.0089577
1997-1999	-0.1069331

Sumber: BPS diolah oleh penulis

Pergeseran tren kepemilikan perusahaan dalam industri kayu lapis dari yang awalnya didominasi oleh PMA kemudian beralih ke PMDN dan lainnya diindikasikan menjadi penyebab ketidakmampuan perusahaan dalam melakukan revitalisasi mesin yang dipergunakan. Hal ini diperkuat dengan adanya data dalam tabel V-4 yang menunjukkan

bahwa tingkat penggunaan tenaga kerja dalam industri kayu lapis di Indonesia semakin meningkat jumlahnya dibandingkan dengan tingkat penggunaan kapitalnya. Pada periode 1993-1995, setiap kenaikan satu persen penggunaan kapital mampu mendorong terjadinya peningkatan output sebesar 40.42 persen, hasil yang tidak jauh berbeda juga didapatkan untuk periode 1995-1997 yaitu sebesar 41.48 persen. Akan tetapi pada periode 1997-1999, hasil yang didapatkan sangat jauh berbeda dengan kedua periode sebelumnya yaitu setiap satu persen kapital yang digunakan hanya mampu meningkatkan output yang dihasilkan sebesar kurang lebih 3.5 persen.

**Tabel V-4**  
**Tingkat Elastisitas Input dalam Industri Kayu lapis (%)**  
**Tahun 1993 – 1999**

	1993-1995	1995-1997	1997-1999
Elastisitas Kapital	40.425	41.487	3.5
Elastisitas T.Kerja	59.57	58.51	96.49

Sumber: BPS diolah oleh penulis

Alasan lain yang menyebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan TFP pada industri kayu lapis di Indonesia diindikasikan akibat penurunan proporsi kayu lapis (output) yang diekspor sebagaimana terlihat pada tabel V-5. Penurunan rata-rata proporsi ekspor tersebut diantaranya akibat krisis ekonomi yang tidak hanya melanda Indonesia namun juga terjadi pada beberapa negara lain yang menjadi negara tujuan ekspor kayu lapis asal Indonesia sehingga permintaan ekspor kayu lapis dari Indonesia pun mengalami penurunan. Selain itu, penurunan proporsi output yang diekspor ini juga dikarenakan semakin meningkatnya persaingan dalam pasar internasional karena beralihnya penggunaan dari kayu lapis jenis *hardwood* ke jenis *softwood* yang memiliki harga lebih murah (Kusumah, 2005). Semakin ketatnya persaingan yang terjadi dalam industri kayu lapis terutama karena semakin



gencarnya penetrasi yang dilakukan oleh Malaysia dalam memasarkan produk kayu lapisnya. Peran Cina sebagai produsen kayu lapis dalam kancah perdagangan internasional patut juga dipertimbangkan. Meskipun negara ini bukan merupakan negara yang memiliki hutan yang luas sebagai bahan baku utama industri kayu lapis, Cina mampu memproduksi dan menjual kayu lapis dengan harga yang murah sebagaimana kemampuannya yang sudah terkenal untuk memproduksi dan menjual barang-barang murah lainnya. Beberapa waktu yang lalu kayu lapis impor Cina harganya sekitar US\$ 150/ m<sup>3</sup> sementara harga kayu lapis Indonesia mencapai US \$ 220-230/m<sup>3</sup> padahal bahan baku industri *plywood* Cina itu diimpor dari Indonesia (Gunarto, Januari 2002).

**Tabel V-5**  
**Perkembangan Kemampuan Ekspor Industri Kayu Lapis**  
**Tahun 1993 – 1999**

Periode	$\Sigma$ Perusahaan Eksporthir Kayu Lapis	$\Sigma$ Perusahaan Non-Eksporthir Kayu Lapis	Rata-Rata Proporsi Ekspor (%)
1993-1995	55	7	82.92
1995-1997	23	9	78.39
1997-1999	16	16	73.31
Total	94	32	

Sumber: BPS diolah oleh penulis

Berdasarkan hasil ringkasan model yang diregresi dalam penelitian ini (lampiran) terlihat adanya ketidaksamaan jumlah observasi antara TFPG sebagai variabel terikat dengan variabel-variabel penjelasnya. Hal ini dikarenakan adanya *missing value* yang disebabkan terdapatnya beberapa data variabel kapital (cs) yang bernilai nol sehingga turut juga mempengaruhi data variabel TFPG yang diperoleh.

### V.3 Analisa Hasil Regresi

#### V.3.1 Analisa Data *Cross Section*

Penjelasan mengenai faktor-faktor yang diidentifikasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan produktivitas industri kayu lapis di Indonesia diawali dengan melakukan pengujian untuk melihat kemungkinan terjadinya pelanggaran asumsi ekonometrika (lampiran). Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan terhadap model yang menggunakan data *cross section* maupun *pooled data*, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat baik dari hasil pengujian dengan menggunakan *matrix correlation* yang menunjukkan nilai korelasi antar dua variabel bebas tidak ada yang lebih dari 0.8 serta berdasarkan *mean vif* yang kesemuanya menunjukkan hasil dibawah angka 10. Adapun berdasarkan pengujian untuk melihat ada tidaknya kesamaan varians antar individu yang dilakukan dengan menggunakan *hettest*, menunjukkan hasil bahwa hanya persamaan regresi untuk periode 1995-1997 pada model 1 tidak menunjukkan adanya masalah heteroskedastis. Adapun untuk persamaan-persamaan regresi lainnya yang dipergunakan dalam model penelitian ini terjadi masalah heteroskedastis. Untuk mengatasi permasalahan ini maka penulis menggunakan persamaan regresi yang telah menggunakan *robust standard error*.

Regresi terhadap model 1 dilakukan untuk masing-masing periode yaitu 1993-1995, 1995-1997, dan 1997-1999. Berdasarkan tabel 5-5, dapat dilihat bahwa variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP pada masing-masing periode berbeda-beda. Pada periode 1993-1995, variabel yang signifikan adalah PDRBCap, agf, sales, dan inflasi. Adapun untuk periode 1995-1997, hanya ada satu variabel yang secara statistik signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP yaitu dstats sementara untuk periode 1997-1999 tidak ada satu pun variabel yang signifikan mempengaruhi.

Hal yang menarik disini adalah, pada periode 1993-1995 PDRBCap meskipun secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan produktivitas (TFP) industri kayu lapis namun hubungan (keterkaitan) antara keduanya berbanding terbalik. Dalam hal ini berarti setiap kenaikan pendapatan per kapita suatu kabupaten sebanyak 1 unit justru menurunkan rata-rata pertumbuhan TFP industri kayu lapis sebesar  $1.40e-07$  unit. Kondisi ini bertolakbelakang dengan hipotesis yang dibuat penulis pada awal penulisan. Penjelasan mengenai ketidaksesuaian antara hasil regresi dengan hipotesis awal tersebut dapat dikaitkan dengan permasalahan tingkat upah yang berlaku. Peningkatan PDRB perkapita dapat menjadi indikator meningkatnya standar hidup penduduk di suatu wilayah. Dengan kata lain, hal tersebut mengindikasikan adanya kenaikan upah minimum (UMR) yang berlaku. Daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang besar umumnya juga mempunyai kebijakan standar tingkah upah yang tinggi. Biaya upah tersebut diperhitungkan sebagai biaya produksi sehingga semakin besar tingkah upah maka akan memicu peningkatan biaya produksi yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Variabel lain yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan TFP perusahaan yaitu laju inflasi dengan arah hasil estimasi yang negatif pada periode 1993-1995. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi yang menjadi indikator kestabilan suatu perekonomian sangat berperan terhadap terjadinya penurunan dalam pertumbuhan produktivitas total yang terjadi pada industri kayu lapis di Indonesia. Inflasi mengakibatkan timbulnya dilema bagi produsen kayu lapis. Pada satu sisi inflasi telah mengakibatkan menurunnya daya beli masyarakat yang tentunya akan berdampak pada terjadinya penurunan permintaan kayu lapis, sementara itu produsen juga tidak bisa menghindar dari kenaikan harga-harga yang menambah beban biaya produksi. Hal ini dapat berdampak pada pengurangan output yang dihasilkan bahkan hingga melakukan pengurangan pekerjaannya sehingga menyebabkan total produktivitas yang dihasilkan menurun.

Berkumpulnya perusahaan-perusahaan kayu lapis di suatu wilayah tertentu yang ditunjukkan oleh variabel agl diharapkan dapat meningkatkan *economies of scale* yang pada akhirnya mampu mendorong peningkatan produktivitas. Akan tetapi hasil regresi menunjukkan bahwa variabel agl secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP. Meskipun sebagian besar perusahaan yang memproduksi kayu lapis banyak terkonsentrasi di pulau Kalimantan khususnya di Kalimantan Timur, namun keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut pada tingkatan kabupaten tergolong sedikit. Jumlah perusahaan yang terdapat pada suatu kabupaten paling banyak hanya tujuh perusahaan sedangkan sisanya menyebar di berbagai kabupaten lainnya sesuai dengan potensi hutan yang dapat digarap untuk menghasilkan bahan baku bagi industri kayu lapis.

Pada tabel 5-5 juga dapat dilihat bahwa pada periode 1993-1995 variabel umur perusahaan secara signifikan dan berkorelasi negatif mempengaruhi rata-rata pertumbuhan TFP meskipun pada periode yang lainnya variabel ini tidak lagi signifikan mempengaruhi. Hal ini menjadi bukti bahwa semakin tua umur perusahaan maka yang akan terjadi adalah pertumbuhan produktivitas yang semakin menurun. Pada industri kayu lapis, perusahaan-perusahaan yang berumur tua sangat identik dengan kondisi permesinan yang berteknologi rendah. Meskipun industri kayu lapis merupakan *resource based industry*, peranan teknologi dalam industri ini tidak bisa diabaikan. Mesin-mesin pengelupas kayu (*rotary*) pada industri kayu lapis di Indonesia umumnya berusia hampir sama dengan lama berdirinya perusahaan. Mesin-mesin tersebut hanya bisa dipergunakan untuk memproses kayu-kayu yang berdiameter besar dan menghasilkan sisa pengelupasan kayu yang masih cukup besar (tidak efisien). Kondisi ini tentu saja sudah tidak lagi sesuai dengan situasi yang terjadi saat ini dimana kayu-kayu berdiameter besar sudah sangat sulit didapatkan seiring meningkatnya laju deforestasi hutan. Kondisi ini semakin menguatkan desakan untuk segera dilakukan revitalisasi permesinan terhadap industri kayu lapis di Indonesia.

Permasalahannya, produsen kayu lapis di tanah air sangat kesulitan untuk melakukan revitalisasi karena terbentur kendala modal. Revitalisasi tersebut memerlukan biaya yang besar sementara sebagian besar kondisi keuangan perusahaan kayu lapis di Indonesia tidak begitu baik akibat berbagai tekanan permasalahan yang harus dihadapi. Oleh karena itu tidak mengherankan jika yang terjadi kemudian adalah peningkatan penggunaan tenaga kerja dalam industri kayu lapis ini sebagaimana telah ditunjukkan dalam tabel 5-4. Pada akhirnya hal ini diindikasikan menjadi alasan yang mendasari tidak signifikannya variabel  $agf$  dalam mempengaruhi pertumbuhan TFP pada industri kayu lapis di Indonesia baik pada periode 1995-1997 maupun periode 1997-1999.

Industri kayu lapis di Indonesia memang masih sangat bergantung dengan pasokan kayu yang berasal dari hutan. Selain karena kondisi mesin-mesin yang hanya mampu memproses kayu dengan diameter besar, pengembangan areal yang secara khusus untuk pembudidayaan pohon yang diperuntukkan untuk industri kayu lapis belum dipersiapkan padahal untuk industri *pulp and paper* telah disediakan hutan tanaman industri (HTI) demi menjamin kelancaran pasokan bahan baku bagi industri ini. Pada awalnya, industri kayu lapis di Indonesia mendapat pasokan bahan baku kayu berdasarkan sistem pemberian HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Kondisi ini didukung oleh kebijakan pemerintah yang mensyaratkan bahwa penerima HPH harus secara vertikal terintegrasi dengan industri pengolahan kayu. Semakin banyak izin HPH yang dimiliki maka akan semakin memperbesar kemampuan produksi perusahaan karena adanya jaminan ketersediaan bahan baku yang mencukupi sehingga produktivitas perusahaan pun dapat ditingkatkan. Dalam penelitian ini, HPH lebih dikaitkan hubungannya dengan kebijakan kehutanan yang sedang diimplementasikan. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel ini tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP industri kayu lapis di Indonesia. Hal yang penting untuk diketahui bahwa kayu untuk bahan baku industri kayu lapis ternyata

tidak hanya semata-mata didapatkan melalui cara resmi namun bisa juga melalui jalur illegal dengan membeli kayu hasil *illegal logging*. Kayu-kayu hasil *illegal logging* ini umumnya lebih murah karena tidak terbebani oleh berbagai pungutan dan pajak yang harus dibayarkan sebagai konsekuensi karena telah mengambil sumber daya alam. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika sebagian besar pengusaha kayu lapis pun ditengarai lebih menyukai untuk menggunakan kayu *illegal* dibandingkan kayu legal dalam memasok kebutuhan bahan baku kayu lapis yang akan diproduksi.

Variabel *dstats* sebagai variabel dummy yang mencerminkan status kepemilikan perusahaan secara statistik signifikan dan berkorelasi positif dalam mempengaruhi pertumbuhan TFP dalam industri kayu lapis untuk periode 1995-1997. Dengan kata lain ketika proporsi kepemilikan PMDN dan lainnya mendominasi perusahaan-perusahaan dalam industri kayu lapis, hal tersebut justru mendorong peningkatan pertumbuhan TFP yang terjadi dalam industri ini. Sekedar mengingatkan bahwa pada saat porsi kepemilikan perusahaan oleh PMA berkurang, penggunaan tenaga kerja dalam industri ini terus meningkat. Akan tetapi pada periode 1997-1999 dimana kepemilikan perusahaan PMDN dan lainnya memiliki jumlah yang sama dengan periode 1995-1997, variabel *dstats* tidak lagi signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP industri kayu lapis. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya *diminishing marginal returns* dimana penambahan penggunaan tenaga kerja hingga batas tertentu justru akan menurunkan produktifitas yang dapat dihasilkannya. Dengan kata lain peningkatan proporsi kepemilikan perusahaan oleh non asing yang dibarengi dengan semakin meningkatnya porsi penggunaan tenaga kerja telah menyebabkan variabel *dstats* ini tidak lagi signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP.

Variabel *rimput* yang dapat menunjukkan rasio ketergantungan industri kayu lapis di Indonesia terhadap bahan baku yang harus diimpor, secara statistik menunjukkan hasil bahwa variabel *rimput* tidak secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP. Hal ini

dikarenakan nilai penggunaan bahan import dalam memproduksi kayu lapis sangat kecil sekali. Import itupun hanya diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan bahan penolong produksi dan bukan bahan baku. Dengan mengacu pada tabel III-2, proporsi penggunaan bahan yang diimport hanya sebesar 0.043 persen. Hal inilah yang kemudian diindikasikan menjadi penyebab ketidaksignifikanan variabel rimput dalam mempengaruhi pertumbuhan TFP pada industri kayu lapis di Indonesia.

**Tabel V-6**  
**Kesesuaian Hipotesis dengan Arah Hasil Estimasi (Model 1)**

Variabel	Estimasi Arah	Arah Hasil Estimasi		
		1993-1995	1995-1997	1997-1999
Dstats	+	-	+	-
PdrbCap	+	-	+	+
Sales	+	+	+	-
Agl	+	+	+	-
Agf	+	-	+	-
Rimput	-	-	-	-
HPH	+	+	-	-
Prprex	+	-	-	-
Inflasi	-	-	+	+

**Tabel V-7**  
**Determinant Pertumbuhan TFP Industri Kayu Lapis di Indonesia**  
**Periode 1993-1999 (Model 1)**

	<b>1993-1995</b>	<b>1995-1997</b>	<b>1997-1999</b>
<b>Konstanta</b>	3.427638 (2.60)	-1.654352 (-1.31)	4.728201 (1.06)
<b>Dstats</b>	-0.0810445 (-0.27)	1.03757 (1.77)*	-0.3487818 (-0.26)
<b>PdrbCap</b>	-1.40e-07 (-2.35)**	2.02e-08 (0.53)	1.97e-06 (1.57)
<b>Sales</b>	7.58e-09 (2.11)**	1.64e-09 (1.14)	-9.76e-09 (-1.11)
<b>Agl</b>	0.5291348 (0.85)	0.3797128 (0.89)	-8.982434 (-1.24)
<b>Agf</b>	-0.0554557 (-2.14)**	0.0268241 (1.04)	-2.986666 (-0.72)
<b>Rimput</b>	-3.427515 (-1.61)	-2.337785 (-1.45)	-0.0919745 (-0.25)
<b>HPH</b>	1.63e-08 (0.47)	-8.23e-09 (-0.17)	-7.11e-07 (-1.00)
<b>Prprex</b>	-0.0059825 (-1.54)	-0.0083603 (-1.67)	-0.0049303 (-0.26)
<b>Inflasi</b>	-0.3016194 (-2.01)*	0.1235019 (1.25)	0.4901304 (0.88)
<b>Adj R-squared</b>	0.1779	0.1503	0.1615
<b>Prob &gt; F</b>	0.0281	0.0191	0.0195
<b>Mean vif</b>	1.40	1.69	2.71
<b>Observasi</b>	57	30	28

Keterangan: \*) *Significance level 10%*

\*\*) *Significance level 5%*

Sumber: Diolah dari output hasil regresi

Regresi yang dilakukan untuk masing-masing periode yaitu 1993-1995, 1995-1997, dan 1997-1999 kembali dilakukan terhadap model 2. Variabel-variabel bebas yang dipergunakan dalam model 2 ini tidak jauh berbeda dengan model 1. Perbedaannya terletak pada penggunaan variabel dprprex untuk menggantikan variabel prprex. Sebagaimana penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Bernard (2007), perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor memiliki pertumbuhan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang tidak melakukan ekspor (*non-exporters*). Akan tetapi berdasarkan



hasil regresi (tabel V-8) yang diperoleh menunjukkan bahwa selain secara statistik variabel *dprprex* tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP dalam industri kayu lapis, arah hasil regresinya pun menunjukkan hasil yang negatif. Berdasarkan hasil regresi yang dilakukan terhadap model 2 (tabel V-8), secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang cukup signifikan antara hasil regresi yang dilakukan terhadap model 1 maupun model 2.

**Tabel V-8**  
**Determinant Pertumbuhan TFP Industri Kayu Lapis di Indonesia**  
**Periode 1993-1999 (Model 2)**

	1993-1995	1995-1997	1997-1999
<b>Konstanta</b>	3.362402 (2.48)	-1.215568 (-0.98)	4.930413 (1.10)
<b>Dstats</b>	-0.0323983 (-0.11)	1.098025 (1.82)*	-.28021 (-0.22)
<b>PdrbCap</b>	-1.40e-07 (-2.33)**	1.39e-08 (0.38)	1.98e-06 (1.57)
<b>Sales</b>	7.25e-09 (2.07)**	1.20e-09 (0.84)	-9.51e-09 (-1.08)
<b>Ag1</b>	0.6055962 (0.96)	0.3455676 (0.80)	-9.095373 (1.26)
<b>Agf</b>	-0.0596492 (-2.08)**	0.0243865 (0.93)	-0.095429 (-0.76)
<b>Rimput</b>	-3.292212 (-1.58)	-1.323874 (-0.84)	-3.387061 (-0.28)
<b>HPH</b>	1.31e-08 (0.40)	1.23e-09 (0.02)	-7.00e-07 (-1.02)
<b>dPrprex</b>	-0.4988757 (-1.41)	-0.6040819 (-1.44)	-.5984871 (-0.39)
<b>Inflasi</b>	-0.2919842 (-1.94)*	0.0853327 (0.93)	0.47143 (0.86)
<b>Adj R-squared</b>	0.1711	0.1093	0.1629
<b>Prob &gt; F</b>	0.2639	0.2546	0.1941
<b>Mean vif</b>	1.44	1.65	2.52
<b>Observasi</b>	57	30	28

Keterangan: \*) *Significance level 10%*  
 \*\*) *Significance level 5%*

Sumber: Diolah dari output hasil regresi

**Tabel V-9**  
**Kesesuaian Hipotesis dengan Arah Hasil Estimasi (Model 2)**

Variabel	Estimasi Arah	Arah Hasil Estimasi		
		1993-1995	1995-1997	1997-1999
Dstats	+	-	+	-
PdrbCap	+	-	+	+
Sales	+	+	+	-
Agl	+	+	+	-
Agf	+	-	+	-
Rimput	-	-	-	-
HPH	+	+	+	-
Prprex	+	-	-	-
Inflasi	-	-	+	+

### V.3.2 Analisa Pooled Data

Selama ini berkembang anggapan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia mulai pertengahan tahun 1997 tak bisa dipungkiri turut berimbas pada semakin menurunnya produktivitas industri kayu lapis di Indonesia. Rata-rata pertumbuhan TFP menurun hingga menyentuh pada pertumbuhan yang negatif (tabel V-3). Hal ini diperkuat dengan hasil regresi yang ditampilkan dalam tabel V-10 dibawah ini dimana hasil regresi justru menunjukkan bahwa adanya krisis yang terjadi menurunkan rata-rata pertumbuhan TFP industri kayu lapis sebesar 0.189 unit. Akan tetapi hasil regresi juga menunjukkan bahwa sebenarnya variabel dkrisis secara statistik tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan TFP-nya. Hal ini berarti adanya krisis tidak bisa dijadikan kambing hitam yang menyebabkan rata-rata pertumbuhan TFP industri ini terus menurun. Adapun berdasarkan model 3 dalam tabel yang sama terlihat bahwa variabel yang justru berpengaruh signifikan secara statistik terhadap pertumbuhan TFP pada industri kayu lapis di Indonesia adalah variabel PDRBcap dan variabel sales. Hasil regresi ini seolah semakin

menguatkan pernyataan bahwa pendapatan per kapita yang besar mengindikasikan adanya peningkatan dalam UMR yang diberikan kepada pekerja sehingga hal tersebut semakin meningkatkan total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan pada akhirnya berpengaruh terhadap penurunan produktivitas yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan kayu lapis terutama yang berada di wilayah tersebut.

Pada sisi lain, berdasarkan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa industri kayu lapis di Indonesia dihadapkan pada kenyataan mengenai harga kayu lapis asal Indonesia yang terus menurun terutama di pasar internasional. Pada penelitian ini untuk melihat bagaimana pengaruh harga domestik maupun harga internasional terhadap pertumbuhan TFP industri kayu lapis di Indonesia, penulis melakukan regresi secara terpisah dengan menggunakan penggabungan data untuk keseluruhan periode. Regresi terpisah ini dilakukan untuk menghindari terjadinya *perfect collinearity* yang menyebabkan salah satu diantara harga domestik maupun harga internasional harus di drop dari model. Berdasarkan model 4 dan 5 (lihat tabel V-10), baik harga kayu lapis yang berasal dari Indonesia baik di pasar domestik maupun di pasar internasional secara signifikan mempengaruhi rata-rata pertumbuhan TFP. Hal yang menarik bahwa setiap kenaikan harga kayu lapis di pasar internasional sebanyak 1 unit justru semakin menurunkan rata-rata pertumbuhan TFP sebanyak 0.0092 unit. Pengaruh hampir serupa juga terjadi pada kenaikan harga kayu lapis di pasar domestik. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan harga kayu lapis yang berasal dari Indonesia baik dipasar internasional maupun di pasar domestik justru menjadi disinsentif bagi industri kayu lapis di Indonesia yang mengakibatkan penurunan dalam produktivitasnya.

Peningkatan harga kayu lapis buatan Indonesia baik dipasar domestik maupun di pasar internasional mungkin pada awalnya dinilai akan sangat menguntungkan produsen karena nilai penjualan yang didapatkan meningkat. Akan tetapi meningkatnya harga kayu

lapis asal Indonesia dipasar internasional maupun di pasar domestik tersebut justru dapat menjadi bumerang sebab dapat menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa produk kayu lapis asal Indonesia tidak kompetitif. Peningkatan harga jual kayu lapis asal Indonesia dikhawatirkan justru akan semakin menurunkan permintaannya karena konsumen mungkin saja akan beralih pada substitusi dari kayu lapis tersebut.<sup>20</sup> Pada akhirnya perusahaan justru dirugikan dengan adanya kenaikan harga yang terjadi. Kondisi tersebut tentu saja dapat mempengaruhi produktivitas total yang bisa dihasilkan oleh industri kayu lapis di Indonesia. Dengan demikian, berdasarkan hasil regresi seperti yang terlihat dalam tabel V-8 dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang secara statistik berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan TFP industri kayu lapis di Indonesia yaitu variabel PDRBcap, sales, pdom, dan pasing.

**Tabel 5-10**  
**Determinant Pertumbuhan TFP Industri Kayu Lapis di Indonesia**

	<b>Estimasi Arah</b>	<b>Model 3<sup>a)</sup></b>	<b>Model 4<sup>b)</sup></b>	<b>Model 5<sup>c)</sup></b>
<b>Konstanta</b>	-	0.1760395 (0.37)	3.056586 (1.57)	4.488416 (1.67)
<b>Dstats</b>	+	0.1470571 (0.56)	0.5774813 (1.06)	.5668047 (1.06)
<b>PdrbCap</b>	+	-5.87e-08 (-1.74)*	1.18e-08 (0.21)	1.34e-08 (0.23)
<b>Sales</b>	+	3.65e-09 (2.09)**	-9.94e-09 (-1.18)	-9.99e-09 (-1.19)
<b>Ag1</b>	+	0.5242644 (1.47)	0.3562881 (0.59)	0.3738895 (0.62)
<b>Agf</b>	+	-0.0201655 (-1.08)	0.0087357 (0.29)	0.0079265 (0.27)
<b>Rimput</b>	-	-2.612649 (-1.60)	2.401308 (1.01)	2.333607 (0.99)
<b>HPH</b>	+	-8.52e-09 (-0.30)	6.89e-08 (0.92)	6.87e-08 (0.92)
<b>Pdom</b>	+	-	-0.0089033 (-1.70)*	-
<b>Pasing</b>	+	-	-	-0.0092067 (-1.70)*
<b>Prprex</b>	+	-0.0033784 (-1.31)	-0.0007043 (-0.12)	-0.0006197 (-0.11)
<b>Dkrisis</b>	-	-0.1894974	-	-

<sup>20</sup> Mengintip Kemungkinan Timor versus Kayu Lapis dalam <http://www.republika.co.id/9610/24/24BOK.03.html> diakses pada 14 Mei 2008

		(-0.93)		
<b>Adj R-squared</b>		0.0828	0.1331	0.1339
<b>Prob &gt;F</b>		0.0704	0.0037	0.0036
<b>Mean vif</b>		1.41	1.44	1.44
<b>Observasi</b>		87	115	115

Keterangan: <sup>a)</sup> *Pooled data 1993-1997*

<sup>b)</sup> *Pooled data 1993-1999*

Sumber: Diolah dari output hasil regresi

